

# ANALISIS PENERAPAN SISTEM ELEKTRONIK NOMOR FAKTUR (E-NOFA) PAJAK SEBAGAI UPAYA MENCEGAH PENERBITAN FAKTUR PAJAK FIKTIF

(Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Utara)

Vitriani Ayu Setyawati

Heru Susilo

Rizki Yudhi Dewantara

(PS Perpajakan, Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya,  
vitrianiayusetyawati@gmail.com)

## ABSTRACT

*This study aims to determine the implementation of Invoice Numbering Electronic System (e-NOFA) and know the barriers as well as the alternative ways to overcome the barriers of the implementation Invoice Numbering Electronic System (e-Nofa) in an attempt to prevent the issue of fictitious tax invoice. The type of research which is used in this study is descriptive with a qualitative approach. The result of this study is implementation of Invoice Numbering Electronic System on tax office Pratama Cikarang Utara is not fully able to prevent fictitious tax invoice especially for a tax invoice which is not published based on actual transactions, since after the implementation of e-Nofa there is still a case of fictitious tax invoice in tax office Pratama Cikarang Utara, but they are able to prevent the issue of fictitious tax invoices published not by PKP. The barriers which arise are difficulty to adjust the system in the company owned by PKP, the person still has to come to the tax office, the dependent system and Internet networks, data synchronization tax office with DJP. Alternative ways to overcome these barriers can be done by the tax office Pratama Cikarang Utara is to disseminate and follow up on existing constraints, E - Nofa Online, improve the quality of systems and Internet networks, and restart the server admin.*

**Keyword :** E-NOFA, Fictitious Tax Invoice

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Sistem Elektronik Penomoran Faktur (e-NOFA) dan hambatan serta alternatif cara mengatasi hambatan penerapan Sistem Elektronik Penomoran Faktur (e-NOFA) sebagai upaya mencegah penerbitan faktur pajak fiktif. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah penerapan sistem elektronik nomor faktur di KPP Pratama Cikarang Utara ini belum sepenuhnya mampu mencegah faktur pajak fiktif terutama untuk faktur pajak yang diterbitkan bukan berdasarkan transaksi yang sebenarnya karena setelah penerapan e-nofa ini masih ada kasus faktur pajak fiktif di KPP Pratama Cikarang Utara, namun mampu mencegah penerbitan faktur pajak fiktif yang diterbitkan bukan oleh PKP. Hambatan yang muncul adalah sulit menyesuaikan sistem di perusahaan milik PKP, masih harus datang ke KPP, ketergantungan sistem dan jaringan internet, sinkronisasi data KPP dengan DJP. Alternatif cara mengatasi hambatan tersebut yang dilakukan oleh KPP Pratama Cikarang Utara adalah dengan melakukan sosialisasi dan menindaklanjuti kendala yang ada, E-NOFA Online, meningkatkan kualitas sistem dan jaringan internet, dan restart server admin.

**Kata Kunci :** E-NOFA, Faktur Pajak Fiktif

## PENDAHULUAN

Reformasi perpajakan di sektor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dilakukan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan negara di sektor perpajakan dengan melakukan, karena Pajak Pertambahan Nilai penyumbang penerimaan negara di sektor perpajakan terbesar kedua setelah Pajak Penghasilan (Badan Pusat

Statistik:2015). Pemerintah melakukan reformasi perpajakan dengan menerapkan Sistem Elektronik Nomor Faktur sebagai salah satu bentuk modernisasi perpajakan. Penomoran faktur pajak yang semula dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak sendiri, setelah adanya Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per - 24/Pj/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam

Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak penomoran faktur pajak dirubah menjadi e-NOFA (Elektronik Nomor Faktur) pajak. E-NOFA diciptakan untuk mencegah penerbitan faktur pajak fiktif, dengan sistem baru ini diharapkan mampu mengurangi praktik kecurangan yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak yang dapat merugikan Negara. Kasus penerbitan faktur pajak fiktif mencapai 100 kasus pada tahun 2010 hingga 2013, hal tersebut dapat merugikan negara karena kerugian negara yang disebabkan faktur pajak fiktif ini sekitar 1,5 Triliun (Widodo dan Widyadnyana:2015). Maraknya kasus faktur pajak fiktif yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab maka pemerintah mengharapakan penerapan e-NOFA dapat mencegah penerbitan faktur pajak fiktif (Direktorat Jenderal Pajak:2013). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Sistem Elektronik Penomoran Faktur (e-NOFA) dan hambatan serta alternatif cara mengatasi hambatan penerapan Sistem Elektronik Penomoran Faktur (e-NOFA) sebagai upaya mencegah penerbitan faktur pajak fiktif.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Administrasi Pajak**

Secara sempit, administrasi pajak merupakan seperangkat cara dari penatausahaan dan pelayanan hak dan kewajiban Wajib Pajak (WP) baik di kantor pajak maupun di tempat/kantor WP (Irianto dkk, 2013:20). Administrasi pajak dikatakan efektif bila mampu mengatasi masalah-masalah : Wajib pajak yang tidak terdaftar, Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak, Penyelundupan Pajak, dan Penunggak Pajak menurut Gunadi (2004) dalam Prahaji (2015: 16).

### **Pajak Masukan dan Pajak Keluaran**

Pajak masukan merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak atas transaksi yang terjadi yang terutang PPN berdasarkan UU PPN (Muljono, 2010:26). Apabila pajak masukan yang dibayarkan oleh Pengusaha Kena Pajak lebih besar daripada pajak keluaran, maka Pengusaha Kena Pajak dapat meminta kembali selisihnya tersebut atau biasa

disebut dengan restitusi PPN. Pajak keluaran merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak atas transaksi yang terjadi yang terutang PPN (Djuanda dan Lubis, 2002:3). Apabila pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, maka Pengusaha Kena Pajak harus menyetorkan selisihnya tersebut ke kas negara (Muljono, 2010: 32).

### **Pengusaha Kena Pajak**

Pengusaha Kena Pajak adalah orang atau badan yang dikenai pajak karena pekerjaannya termasuk ke dalam transaksi yang terutang Pajak berdasarkan UU Perpajakan (Judisseno, 2005:332). Batasan Pengusaha yang wajib dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak adalah yang memiliki omzet di atas Rp 4.800.000.000 setahun. Pengusaha yang dikecualikan dari kewajiban Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha kecil dan/atau pengusaha yang semata-mata menyerahkan barang dan/atau jasa yang tidak dikenakan PPN (Mardiasmo, 2011: 29).

### **Faktur Pajak Fiktif**

Faktur pajak adalah bukti transaksi yang harus dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak atas transaksi Barang dan/jasa yang kena pajak berdasarkan Undang-Undang Perpajakan (Mardiasmo, 2011:290). Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 132/PJ/2010 tentang Langkah-Langkah Penanganan atas Penerbitan dan Penggunaan Faktur Pajak Tidak Sah yang dimaksud faktur pajak fiktif atau faktur pajak tidak sah merupakan faktur pajak yang dianggap tidak sah karena faktur pajak tersebut dibuat tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dan/atau dibuat oleh Pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak Berdasarkan Undang-Undang.

### **Penyebab Penerbitan Faktur Pajak Fiktif**

Faktur pajak merupakan salah satu bentuk penyelewengan pajak. Penerbitan faktur pajak fiktif yang dilakukan oleh WP yang tidak bertanggung jawab menurut Yamin dan Putranti (2009:2) disebabkan karena Kemudahan Restitusi PPN dan Hasil Penggelapan Pajak Lebih Besar Dari Biaya Yang Akan Dikeluarkan Apabila Tertangkap Dan Dihukum. Penerbitan faktur pajak fiktif juga disebabkan karena perusahaan

dengan mudahnya menerbitkan faktur pajak. Perusahaan dapat dengan mudahnya menerbitkan faktur pajak dan mengkreditkan pajak masukan perusahaannya. Sebelum tahun 2013 terdapat faktur pajak yang diterbitkan oleh WP yang belum dikukuhkan sebagai PKP atau non PKP. Hal ini terjadi karena tidak ada sistem yang menyaring atau mengatur untuk WP non PKP agar tidak bisa menerbitkan faktur pajak atau disebut faktur pajak fiktif yang diterbitkan oleh non PKP tersebut. Pemerintah belum mengatur dan menetapkan sebuah sistem yang dapat diterapkan agar faktur pajak yang diterbitkan oleh WP non PKP tersebut terdeteksi sejak dini sehingga memudahkan dan membantu pemerintah dalam hal pengawasan faktur pajak, salah satunya adalah belum diterapkannya sistem elektronik nomor faktur untuk mengawasi faktur pajak yang diterbitkan oleh non PKP.

### **Pengolahan Data Elektronik**

Pengolahan data elektronik dapat diartikan sebagai pengubahan data dari bentuk semula atau data mentah menjadi data yang dapat memberikan informasi dengan menggunakan alat elektronik (Syahrini, 2013:1). Siklus pengolahan data elektronik memiliki 3 (tiga) tahapan dasar, yakni : *Input, processing* , dan *output*. Siklus pengolahan data elektronik tersebut dapat dikembangkan lagi menjadi origination, input, processing, Storage, output dan Distribution (Jogiyanto:2006 dalam Prahaji, 2015:31).

### **Sistem Informasi Manajemen**

Sistem informasi manajemen dapat didefinisikan juga sebagai sistem yang mengubah data dalam sistem *frontline*, sebagai sistem pengolahan transaksi menjadi informasi yang berguna bagi para manajer (Sudiro, Rahadian dan Prima, 2011:6).

### **Kualitas Sistem**

Kualitas sistem merupakan ciri atau karakteristik kualitas yang diinginkan dari sistem informasi itu sendiri, dan kualitas informasi yang diinginkan informasi karakteristik produk (DeLone dan Mclean, 2003 dalam Nugroho, 2011:4). Terdapat 5 (lima) indikator dalam pengukuran suatu kualitas sistem yang terdapat pada model kesuksesan sistem informasi DeLone

dan McLean (2003) dalam dalam Nugroho, 2011:4) yang diantaranya kemudahan penggunaan, kecepatan akses, keandalan sistem , fleksibilitas sistem, dan keamanan sistem.

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau (Hamdi dan Bahrudin, 2014:5). Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena sosial melalui gambaran holistik dan memperbanyak pemahaman mendalam (Moleong, 2012:31). Alasan peneliti memilih jenis penelitian ini adalah karena peneliti ingin mendeskripsikan bagaimana penerapan Elektronik Nomor Faktur (e-NOFA) pajak pada KPP Cikarang Utara sebagai upaya mencegah faktur pajak fiktif. Peneliti juga ingin menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi di KPP Pratama Cikarang Utara terutama mengenai faktur pajak fiktif. Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah :

1. Penerapan e-NOFA pada KPP Pratama Cikarang Utara, dalam hal ini dibagi menjadi 4 (empat) fokus yakni:
  - a. Tahap Persiapan dalam penerapan e-NOFA
  - b. Tahap Pelaksanaan e-NOFA
  - c. Tahap Pengawasan e-NOFA
  - d. Tahap evaluasi e-NOFA
2. Penerapan e-NOFA sebagai upaya mencegah penerbitan faktur pajak fiktif.
3. Hambatan-hambatan dalam penerapan e-NOFA dan cara mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Utara. Sumber data utama atau biasa yang disebut sebagai data primer, yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah wawancara kepada pihak-pihak KPP Pratama Cikarang Utara, DJP Pusat serta PKP yang memahami dan terlibat langsung dalam penerapan sistem elektronik nomor faktur (e-nofa). Sumber data sekunder dalam penelitian ini yakni data-data yang diperlukan yang terdapat pada KPP Pratama Cikarang Utara,

yakni data faktur pajak fiktif, materi mengenai sistem e-nofa serta peneliti juga menggunakan buku-buku yang diperlukan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data menurut (Creswell: 2009 dalam Fawaid, 2009:50). Tahapan pertama dalam analisis data adalah mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Tahapan kedua adalah membaca keseluruhan data. Tahapan ketiga adalah menganalisis lebih detail dengan meng-coding data. Tahapan keempat adalah terapkan proses coding. Tahapan kelima adalah tunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi atau laporan kualitatif. Tahapan keenam yang merupakan langkah terakhir dalam analisis data adalah menginterpretasi atau memaknai data (Creswell: 2009 dalam Fawaid, 2012:277).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Sistem Elektronik Nomor Faktur

Sejak tahun 2013 penomoran faktur pajak diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak, berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-24/PJ/2012 penomoran faktur pajak dilakukan secara elektronik dengan meminta kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan. Regulasi disiapkan oleh pemerintah agar terdapat regulasi atau tahapan yang jelas agar PKP dapat menggunakan sistem e-nofa tersebut.

Tahapan bagi PKP agar dapat menggunakan sistem elektronik nomor faktur ini adalah melakukan permintaan kode aktivasi dan *password*, melakukan aktivasi akun, melakukan permintaan sertifikat elektronik dan jika telah melakukan tahapan-tahapan tersebut PKP dapat melakukan permintaan nomor seri faktur pajak dengan menggunakan e-nofa. PKP harus meminta langsung kode aktivasi dan *password* serta sertifikat elektronik dengan datang langsung ke KPP dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Per-24/PJ/2012 Tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam

Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian, Dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak.

### Langkah-Langkah Penerapan Sistem Elektronik Nomor Faktur

#### 1. Persiapan Dari Sisi Regulasi dan Proses Bisnis oleh DJP Pusat

Tahapan pertama yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak adalah dengan membuat persiapan dari sisi regulasi. DJP menyiapkan regulasi dan proses bisnis mengenai sistem e-nofa ini agar pihak-pihak yang nantinya terlibat dalam penerapan sistem e-nofa ini terdapat peraturan yang jelas dan tahapan-tahapan yang jelas agar dapat menerapkan sistem e-nofa ini. Permintaan nomor seri faktur pajak secara elektronik ini tentunya tidak serta merta Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat meminta langsung nomor seri faktur pajak tersebut, terdapat tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Tahapan-tahapan permintaan nomor seri faktur pajak tersebut tentunya terdapat pada regulasi yang sudah dibuat oleh DJP.

#### 2. Membangun Sistem Informasi dan Aplikasi

Penerapan e-nofa ini membutuhkan sistem informasi dan aplikasi yang mendukung agar penerapan e-nofa tersebut dapat berjalan. Sistem informasi yang dibuat oleh DJP dalam penerapan e-nofa ini termasuk ke dalam sistem terintegrasi IT DJP (SIDJP) karena pengawasan e-nofa nantinya dilakukan melalui sistem terintegrasi IT DJP (SIDJP) tersebut. DJP dan KPP Pratama Cikarang Utara juga mempersiapkan dari sisi aplikasi sebelum diterapkannya e-nofa tersebut agar penerapan e-nofa tersebut dapat mencapai tujuan yang diinginkan, salah satunya adalah sebagai upaya mencegah penerbitan faktur pajak fiktif. DJP menyiapkan seluruh infrastruktur yang dibutuhkan dalam penerapan e-nofa tersebut termasuk menyiapkan sistem untuk e-nofa tersebut, karena e-nofa merupakan salah satu aplikasi pengolah data elektronik sehingga menghasilkan *output* yakni Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP).

#### 3. Sosialisasi dan Pelatihan Sistem E-NOFA

Sosialisasi penting dilakukan sebelum penerapan e-nofa ini untuk memberikan pengarahan dan pemahaman kepada para petugas yang menangani e-nofa dan tentunya kepada para Pengusaha Kena Pajak yang

nantinya wajib menerapkan e-nofa ini agar Pengusaha Kena Pajak tidak takut salah dalam menggunakan sistem e-nofa tersebut. Sosialisasi dilakukan juga agar penerapan e-nofa ini diharapkan dapat berjalan dengan lancar nantinya. Sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan oleh KPP Pratama Cikarang Utara dilakukan kepada pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penerapan e-nofa tersebut, yakni petugas KPP Pratama Cikarang Utara dan PKP yang nantinya akan menerapkan sistem e-nofa tersebut. Sosialisasi dilakukan oleh DJP dan KPP melalui sosialisasi langsung yang dilakukan di KPP Pratama Cikarang Utara maupun secara tidak langsung melalui radio, banner dan iklan di televisi.

#### 4. Penerapan Sistem E-NOFA

Sejak tahun 2013 PKP wajib melakukan penomoran faktur pajak secara elektronik melalui sistem e-nofa. Penerapan e-nofa ini mundur dari waktu yang telah ditentukan oleh DJP dikarenakan adanya ketidaksiapan PKP dalam menyesuaikan sistem di perusahaan mereka, meskipun begitu penerapan e-nofa di KPP Pratama Cikarang Utara telah sesuai dengan peraturan DJP dan berjalan dengan baik hal ini terbukti dari manfaat-manfaat yang dirasakan oleh KPP Pratama Cikarang Utara dan PKP setelah diterapkannya e-nofa ini, yakni mempermudah KPP dalam pengadministrasian PKP, mempermudah mengawasi nomor faktur pajak yang beredar, serta mempermudah PKP dalam melakukan penomoran faktur pajak.

#### 5. Pengawasan Sistem E-NOFA Yang Telah Berjalan

Pihak KPP Pratama Cikarang Utara maupun pihak DJP terus mengawasi dalam pelaksanaan sistem e-nofa. Pengawasan tersebut dilakukan baik dari sisi aplikasi maupun dari sisi penomoran faktur pajak secara elektronik tersebut, hal ini dilakukan untuk membuat WP merasa nyaman dan aman dalam menggunakan sistem e-nofa tersebut dan juga agar penerapan e-nofa tersebut dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Pengawasan dilakukan oleh pihak KPP, jika ada keluhan atau masalah, KPP menyampaikannya kepada DJP.

Pengawasan yang dilakukan oleh KPP Pratama Cikarang Utara dilakukan untuk mengawasi penerapan e-nofa tersebut apakah penerapan e-nofa sudah berjalan dengan baik

atau masih terdapat kekurangan atau kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penerapan e-nofa tersebut, jika masih terdapat kendala atau kekurangan dari e-nofa tersebut data dari pengawasan tersebut dijadikan sebagai bahan untuk evaluasi DJP dan KPP Pratama Cikarang Utara untuk penerapan e-nofa tersebut. Pengawasan yang dilakukan terhadap e-nofa yang telah berjalan juga berguna untuk mengetahui apakah e-nofa tersebut sudah dapat mencapai tujuan utamanya yakni untuk penertiban administrasi WP terutama dalam hal penerbitan faktur pajak yang dilakukan oleh PKP sebagai upaya mencegah penerbitan faktur pajak fiktif, jika dari data pengawasan masih ada celah untuk penyalahgunaan di bidang PPN, maka data tersebut diperlukan untuk tindak lanjut dari e-nofa agar dapat menutupi celah-celah yang masih ada.

#### 6. Evaluasi Penerapan Sistem E-NOFA

Evaluasi atas penerapan e-nofa dilakukan oleh KPP Pratama Cikarang Utara dan DJP baik dari sisi aplikasi, pelayanan maupun administrasi, hal ini dilakukan untuk memberikan kenyamanan, kenyamanan dan kemudahan bagi WP serta demi tercapainya tujuan diterapkannya e-nofa itu sendiri. Evaluasi yang dihasilkan dalam penerapan e-nofa sebagai masukan untuk KPP Pratama Cikarang Utara dan DJP dalam hal perbaikan administrasi PPN dan peningkatan pelayanan. Perbaikan administrasi PPN dan peningkatan layanan berguna untuk mengoptimalkan penerimaan PPN.

Evaluasi yang dilakukan oleh DJP dan KPP Pratama Cikarang Utara difokuskan kepada perbaikan administrasi PPN dan peningkatan pelayanan. Jika DJP dan KPP Pratama Cikarang Utara menemukan kendala dari sistem yang diterapkan termasuk e-nofa tersebut, mereka langsung menindaklanjutinya dan memberikan solusi. DJP dan KPP Pratama Cikarang Utara terus melakukan evaluasi atas setiap sistem atau kebijakan yang diterapkan oleh DJP sebagai upaya perbaikan administrasi PPN. DJP berusaha menutupi celah tersebut jika dirasa masih ada celah untuk pihak-pihak yang akan melakukan penyalahgunaan peraturan perpajakan agar bisa diatasi dan membuat

seminim mungkin kerugian yang ditimbulkan oleh celah tersebut.

**Pencegahan Faktur Pajak Fiktif pada KPP Pratama Cikarang Utara Setelah Penerapan E-NOFA**

Penerapan e-nofa di KPP Pratama Cikarang Utara membantu mencegah penerbitan faktur pajak fiktif yang diterbitkan bukan oleh PKP, karena penggunaan e-nofa ini hanya boleh digunakan oleh PKP saja, sehingga untuk penerbitan faktur pajak diterbitkan oleh bukan PKP akan otomatis ditolak oleh sistem e-nofa tersebut. Jika sebelum penerapan e-nofa terdapat kasus faktur pajak yang diterbitkan oleh non PKP karena sulit bagi pemerintah mengawasi faktur pajak fiktif tersebut, setelah penerapan sistem e-nofa tersebut terdapat persyaratan ketika proses awal penerapan e-nofa yakni orang tersebut harus sudah dikukuhkan sebagai PKP. Jika belum dikukuhkan sebagai PKP, permintaan nomor seri faktur pajak yang menjadi syarat bahwa faktur pajak tersebut dikatakan sah atau tidak fiktif maka otomatis akan ditolak oleh KPP Pratama Cikarang Utara dan sistem e-nofa tersebut, sehingga dengan e-nofa ini bisa mencegah penerbitan faktur pajak fiktif yang diterbitkan oleh non PKP di KPP Pratama Cikarang Utara.

Namun, penerapan e-nofa di KPP Pratama Cikarang Utara ini belum bisa sepenuhnya atau 100% dapat mencegah kasus faktur pajak fiktif yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya di KPP Pratama Cikarang Utara, karena berdasarkan data yang di dapat dari KPP Pratama Cikarang Utara pada tahun 2008 hingga tahun 2015 ini tercatat masih ada 56 kasus faktur pajak fiktif di KPP Pratama Cikarang Utara. Setelah penerapan e-nofa ini secara nasional juga belum bisa mencegah seluruhnya kasus faktur pajak fiktif yang ada di seluruh KPP di Indonesia. Tabel 1 menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kasus faktur pajak fiktif yang disidik pada tahun 2013-2015 setelah penerapan e-nofa. Tabel 6 menunjukkan sebelum penerapan e-nofa pada tahun 2008-2012 terdapat 49 kasus faktur pajak fiktif yang disidik di seluruh Indonesia. Namun, pada tahun 2013-2015 yakni setelah penerapan e-nofa terjadi peningkatan kasus faktur pajak fiktif yang disidik yang berjumlah 53 kasus.

**Tabel 1. Jumlah Kasus Faktur Pajak Fiktif Yang Disidik**

Tahun	Jumlah Kasus Faktur Pajak Fiktif yang disidik
2008	7
2009	14
2010	11
2011	16
2012	1
2013	38
2014	11
2015	4

**Sumber: Direktorat Intelijen dan Penyidik Kantor Pusat DJP, 2015**

**Hambatan-hambatan dalam Penerapan E-Nofa pada KPP Pratama Cikarang Utara**

**1. Sulit Menyesuaikan Sistem di Perusahaan Milik PKP**

Pada awal penerapan e-nofa, PKP sulit untuk menyesuaikan sistem di perusahaan mereka, karena pada awalnya penomoran faktur dilakukan manual oleh PKP sendiri, setelah penerapan e-nofa PKP harus meminta nomor seri faktur pajak terlebih dahulu sebelum membuat faktur pajak nya tersebut. Ketidaksiapan PKP dalam menyesuaikan sistem ini menyebabkan mundurnya penerapan e-nofa yang awalnya harusnya diterapkan mulai Maret 2013, mundur menjadi Juni 2013.

**2. Masih Harus Datang Ke KPP**

Pada awal penerapan e-nofa, pada tahun 2013 hingga 2015 permintaan nomor seri faktur pajak hanya bisa dilakukan melalui datang langsung ke KPP tempat PKP dikukuhkan. Hal ini membuat penerapan e-nofa ini belum efisien karena setiap PKP harus datang langsung ke KPP dan jika hari libur, nomor seri faktur pajak tidak dapat diminta, harus menunggu hari kerja berikutnya. Jika permintaan nomor seri faktur pajak hanya bisa dilakukan di KPP pada hari kerja, PKP kesulitan jika tiba-tiba kehabisan nomor seri tersebut pada hari libur. Penomoran faktur tersebut hanya bisa dilakukan setelah tanggal permintaan nomor seri tersebut ke KPP, nomor seri tersebut tidak boleh digunakan sebelum tanggal ketika dimintanya nomor seri tersebut. Selain itu, permintaan kode aktivasi dan

*password* serta permintaan sertifikat elektronik juga harus diminta oleh PKP dengan datang langsung ke KPP tempat PKP dikukuhkan. Pada tahapan tersebut PKP belum boleh melakukan permintaan kode aktivasi, *password* serta sertifikat elektronik secara online.

### 3. Ketergantungan Sistem dan Koneksi Jaringan Internet

Jika permintaan nomor seri faktur pajak hanya bisa dilakukan di KPP pada hari kerja, PKP kesulitan jika tiba-tiba kehabisan nomor seri tersebut pada hari libur. Penomoran faktur tersebut hanya bisa dilakukan setelah tanggal permintaan nomor seri tersebut ke KPP, nomor seri tersebut tidak boleh digunakan sebelum tanggal ketika dimintanya nomor seri tersebut. Ketergantungan jaringan yang terpusat ini juga bisa menghambat pendaftaran petugas e-nofa yang ingin dilakukan oleh PKP. PKP harus menunggu jika ada kendala jaringan atau sistem eror tersebut. Pada saat awal penerapan e-nofa PKP juga terkadang memiliki kendala pada masalah sistem ketika akan meminta kode aktivasi atau *password*. Data registrasi ulang PKP yang menjadi syarat PKP untuk mendapatkan kode aktivasi dan *password* terkadang tidak terekam oleh sistem. Hal ini menyebabkan PKP harus dikukuhkan kembali oleh KPP tersebut. Sedangkan, pada saat permintaan nomor seri faktur pajak dalam penerapan e-nofa ini, PKP juga terkadang terkendala pada sistem eror. Jika seperti itu, PKP harus menunggu dan harus terus mencoba untuk melakukan permintaan nomor tersebut.

### 4. Sinkronisasi Data KPP dengan DJP Pusat

Dalam penerapan e-nofa ini, terdapat hambatan biasanya terjadi belum tersinkronisasinya data KPP dengan DJP Pusat. Hal ini bisa menghambat permintaan kode aktivasi dan *password* e-nofa tersebut. Jika data nya belum tersinkronisasi, maka PKP harus menunggu dulu hingga data nya tersinkronisasi baru PKP bisa mendapatkan kode aktivasi dan *password* e-nofa.

Hambatan yang dirasakan sebelum penerapan e-nofa salah satunya adalah kesulitan PKP dalam penyesuaian sistem yang terdapat pada perusahaan mereka. Hal ini menyebabkan pelaksanaan e-nofa yang awalnya akan dilaksanakan pada Maret 2013 mundur menjadi Juni 2013. Menurut peneliti, sosialisasi yang

dilakukan oleh KPP Pratama Cikarang Utara harus lebih ditingkatkan agar PKP tidak merasa kesulitan dalam penyesuaian penerapan e-nofa tersebut. Hambatan yang terdapat pada penerapan e-nofa di KPP Pratama Cikarang Utara salah satunya adalah berhubungan dengan masalah sistem dari e-nofa tersebut. Sistem yang digunakan dalam penerapan e-nofa tersebut terkadang menjadi kendala dalam pelaksanaan e-nofa. Suatu sistem yang baik dapat dilihat dari kualitas sistem, seperti yang sudah dijelaskan pada bab tinjauan pustaka sebelumnya, terdapat 5 (lima) model kesuksesan sistem informasi menurut DeLeon dan McLean yakni kemudahan penggunaan (*Ease of Use*), kecepatan akses (*Response Time*), keandalan sistem (*Reliability*), fleksibilitas sistem (*Flexibility*), dan keamanan sistem (*security*).

Keandalan pada sistem e-nofa terkadang masih terhambat oleh kendala sistem yang *down* dan sinkronisasi data KPP dengan DJP tidak berjalan dengan baik. Penerapan sistem e-nofa yang terpusat oleh DJP terkadang mengalami kendala dalam hal sistem dan jaringan yang ada di KPP Pratama Cikarang Utara dan DJP. Aplikasi e-nofa terkadang tidak dapat diakses oleh KPP Pratama Cikarang Utara maupun PKP yang akan melakukan pendaftaran petugas e-nofa dan pada saat permintaan nomor seri faktur pajak. Jika sudah terjadi demikian, pihak KPP Pratama Cikarang Utara dan PKP hanya bisa menunggu hingga sistem tersebut bisa kembali dari DJP Pusat. Hal ini tentunya bisa menghambat KPP Pratama Cikarang Utara dalam melakukan pelayanan e-nofa tersebut dan dapat menghambat PKP dalam hal permintaan nomor seri faktur pajak karena sistem tersebut terkadang masih terkendala oleh sistem *down* dan sinkronisasi data yang dapat berpengaruh pada keandalan sistem untuk membantu mempercepat pekerjaan PKP dalam hal penomoran faktur pajak.

Selain itu, pada awal penerapan sistem e-nofa PKP hanya bisa melakukan permintaan nomor seri faktur pajak melalui datang langsung ke KPP. Hal ini tentunya akan menyulitkan PKP untuk melakukan pekerjaannya pada saat itu karena waktunya habis untuk mengantri di KPP untuk melakukan permintaan nomor seri faktur pajak tersebut. PKP akan merasa lebih puas dalam menggunakan sistem e-nofa tersebut

apabila sistem e-nofa tersebut fleksibel dalam memenuhi kebutuhan PKP yakni dalam hal penomoran pajak. Jika penomoran dilakukan hanya bisa melalui KPP, PKP menganggap bahwa penerapan sistem e-nofa tersebut belum fleksibel karena belum bisa diakses langsung oleh PKP di tempat mereka bekerja sehingga PKP dapat lebih fleksibel dalam hal membantu memenuhi kebutuhan PKP yakni penomoran faktur pajak. Namun, atas hambatan tersebut DJP selaku pembuat kebijakan telah memberikan solusi kepada PKP.

#### **Alternatif Cara Mengatasi Hambatan Penerapan E-Nofa pada KPP Pratama Cikarang Utara**

##### **1. Melakukan Sosialisasi dan Menindaklanjuti Kendala Yang Ada**

Pada saat awal penerapan e-nofa, banyak PKP yang belum siap untuk menyesuaikan sistem yang ada di perusahaan PKP tersebut. Hal yang dilakukan DJP termasuk KPP Pratama Cikarang Utara adalah dengan melakukan sosialisasi kepada para PKP agar PKP dapat benar-benar memahami sistem e-nofa tersebut. Ketika terdapat permasalahan di lapangan misalnya salah satunya adalah ketidaksiapan WP, maka DJP menindaklanjuti dengan membuat pengumuman untuk memberikan solusi atas permasalahan tersebut.

##### **2. E-Nofa Online**

Pada saat permintaan nomor seri faktur pajak pada awalnya PKP harus datang langsung ke KPP. Hal ini tentu sangat tidak efisien karena ketika datang ke KPP, antriannya bisa panjang sekali dan tidak efisien untuk PKP yang perusahaan nya jauh dari KPP tersebut. Selain itu, permintaan nomor seri faktur pajak melalui KPP tersebut tidak bisa dilakukan pada saat hari libur ketika misalnya nomor seri tersebut habis ketika bertepatan dengan hari libur. Sejak diterapkannya e-faktur pada tahun 2015, permintaan nomor seri faktur pajak dapat dilakukan melalui website DJP. PKP tidak harus mengantri panjang lagi untuk datang ke KPP dalam hal meminta nomor seri faktur pajak tersebut. Namun, untuk permintaan kode aktivasi, *password*, dan sertifikat elektronik sampai saat ini hanya boleh dilakukan PKP dengan datang langsung ke KPP tempat PKP dikukuhkan, melihat hal tersebut PKP

mengharapkan seluruh tahapan dari penerapan sistem elektronik nomor faktur ini sudah bisa dilakukan dengan online secara keseluruhan sehingga dapat membantu memudahkan PKP.

##### **3. Meningkatkan Kualitas Sistem dan Jaringan Internet**

Sistem e-nofa yang bergantung kepada sistem yang terpusat pada DJP menyebabkan sering terjadi server eror atau down, hal ini dikarenakan banyaknya KPP dan PKP yang mengakses sistem e-nofa tersebut. Sistem e-nofa ini juga sangat bergantung pada jaringan internet, karena untuk dapat mengakses sistem e-nofa ini dibutuhkan sambungan internet yang memadai. Ketika Server atau jaringan sedang down, maka KPP Pratama Cikarang Utara serta PKP yang terdaftar di KPP Pratama Cikarang Utara hanya bisa menunggu dari DJP pusat dan terus mencoba sampai aplikasi e-nofa tersebut bisa. KPP Pratama Cikarang Utara mengupayakan pelayanan secepat mungkin. KPP Pratama Cikarang Utara mengharapkan adanya peningkatan kualitas sistem dan jaringan agar tidak terjadi lagi sistem error.

##### **4. Restart Server Admin**

Dalam hal data KPP yang tidak tersinkronisasi dengan baik dengan DJP, Operator Console dapat merestart server admin agar data tersebut bisa tersinkronisasi. Jika *Operator Console* sudah melakukan restrat server admin, data tersebut nantinya akan bisa kembali tersinkronisasi.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dan berdasarkan fokus penelitian yang telah ditetapkan, maka peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan, yakni:

1. Langkah-langkah Penerapan Sistem Elektronik Nomor Faktur (e-nofa) yakni tahapan persiapan yang terdiri dari persiapan regulasi dan proses Bisnis E-NOFA dan membangun sistem informasi dan aplikasi, Sosialisasi dan Pelatihan Sistem E-NOFA, Penerapan Sistem Elektronik Nomor Faktur (e-NOFA), Pengawasan Sistem E-NOFA yang Telah Berjalan, Evaluasi Penerapan Sistem E-NOFA.



2. Penerapan e-nofa di KPP Pratama Cikarang Utara sebagai upaya mencegah penerbitan faktur pajak fiktif yang sudah berjalan dapat membantu KPP Pratama Cikarang Utara dalam mencegah peredaran nomor faktur pajak fiktif yang diterbitkan bukan oleh PKP, namun penerapan e-nofa di KPP Pratama Cikarang Utara belum sepenuhnya dapat mencegah penerbitan faktur pajak fiktif di KPP Pratama Cikarang Utara karena sampai tahun 2015 masih terdapat kasus faktur pajak fiktif yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang tercatat di KPP Pratama Cikarang Utara maupun secara nasional.
3. Hambatan-hambatan dalam Penerapan E-NOFA pada KPP Pratama Cikarang Utara yakni sulit menyesuaikan sistem pada perusahaan milik PKP, masih harus datang ke KPP, ketergantungan sistem dan koneksi jaringan internet, sinkronisasi data KPP dengan DJP tidak berjalan dengan baik
4. Alternatif Cara Mengatasi Hambatan Penerapan E-NOFA pada KPP Pratama Cikarang Utara adalah dengan melakukan sosialisasi dan menindaklanjuti setiap kendala yang ada, proses e-nofa yang online seluruhnya, meningkatkan kualitas sistem dan jaringan, restart server admin.

#### Saran

Penelitian mengenai Penerapan E-NOFA sebagai Upaya Mencegah Penerbitan Faktur Pajak Fiktif ini, peneliti dapat menyarankan:

1. Peningkatan kualitas sistem perlu dilakukan oleh DJP dan KPP Pratama Cikarang Utara yakni dari segi keandalan, yakni perlu adanya pemilihan provider jaringan yang memiliki kualitas lebih bagus lagi agar masalah jaringan yang dikeluhkan tidak menghambat dalam penggunaan e-nofa, hal ini dilakukan agar penerapan e-nofa bisa dikatakan sudah berjalan dengan baik jika memiliki kualitas sistem yang baik juga dan penerapan e-nofa ini dapat berjalan mencapai tujuan yang diinginkan yakni memudahkan PKP dalam menggunakan sistem penomoran faktur secara elektronik (e-nofa) tersebut
2. Peningkatan kualitas sistem dari segi kemananan juga perlu dilakukan dengan cara terdapat peraturan perpajakan yang mengatur mengenai pembuatan faktur

komersial atau biasa disebut dengan invoice dijadikan satu dengan faktur pajak dengan menggunakan nomor seri faktur yang sama yang di dapat dari e-nofa tersebut, karena di Indonesia invoice dan faktur pajak masih dibuat terpisah dengan nomor yang berbeda. Jika menggunakan nomor faktur yang sama dapat membantu DJP dalam pengawasan karena transaksi yang berada di dalam faktur pajak merupakan transaksi yang sebenarnya yang terdapat dalam invoice yang digunakan juga oleh perusahaan untuk pelanggan atau sebaliknya.

3. Perlu adanya sanksi yang dapat memberikan efek jera secara langsung kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan faktur pajak fiktif. DJP perlu mempertegas peraturan sanksi perpajakan yang dikenakan atas penerbitan faktur pajak fiktif yakni terutama untuk sanksi yang bersifat persuasif dan perlu diadakannya sosialisasi oleh DJP dan KPP kepada PKP mengenai sanksi-sanksi perpajakan yang akan dikenakan apabila PKP menerbitkan faktur pajak fiktif.
4. KPP dan DJP perlu meningkatkan sosialisasi mengenai sistem elektronik administrasi perpajakan yang diterapkan oleh DJP tersebut terutama sistem e-nofa ini dengan melakukan sosialisasi secara langsung kepada PKP lebih digencarkan lagi sehingga para PKP tidak merasa sulit dalam menggunakan sistem e-nofa dan dengan adanya sistem e-nofa ini.
5. Pengawasan yang detail perlu dilakukan oleh DJP mengenai mekanisme restitusi PPN dan pengkreditan pajak masukan yang dilakukan PKP. DJP bisa mengkaji kembali mengenai prosedur mengenai pemeriksaan kepada PKP yang akan melakukan restitusi PPN dan pengkreditan pajak masukan agar PKP tidak menganggap proses restitusi PPN dan pengkreditan pajak masukan tersebut mudah dan membuat PKP dapat terus menemukan celah untuk melakukan penyalahgunaan di bidang perpajakan terutama dalam hal faktur pajak fiktif.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2015. *Realisasi Penerimaan Negara*, diakses pada tanggal 12 Oktober 2015 dari

- <http://www.bps.go.id/index.php/linkTabelSatis/1286>.
- Creswell, John W. 2009. *Research Design*. Edisi 3. Diterjemahkan oleh : Achmad Fawaid. 2012. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2013. *Cegah Faktur Pajak Fiktif, Penomorannya Diatur Ulang*, diakses pada tanggal 18 Januari 2015 dari <http://www.pajak.go.id/content/cegah-faktur-pajak-fiktif-penomorannya-diatur-ulang>.
- Djuanda, Gustian dan Irwansyah Lubis. 2002. *Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*. Edisi Revisi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hamdi, Asep Saepul dan Bahrudin. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi dalam Pendidikan* [Internet]. Yogyakarta: Deepublish. Terdapat pada : <https://books.google.co.id/books> [diakses pada tanggal 30 Oktober 2015].
- Irianto, Edi Slamet dkk. 2013. *Pajak Kepemimpinan dan Masa Depan Lintas Generasi* [Internet]. Jawa Tengah: Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah. Terdapat pada : <https://books.google.co.id/books> [diakses pada tanggal 15 Oktober 2015].
- Judisseno, Rimsy K., 2005. *Pajak dan Strategi Bisnis*. Edisi Revisi. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2011. Yogyakarta : Andi.
- Moleong, Lexy J.. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya Offset.
- Muljono, Djoko. 2010. *Panduan Brevet Pajak : PPN, PPh.BM, Bea Materai, PBB, BPHTB* [Internet]. Yogyakarta: ANDI. Terdapat pada : <https://books.google.co.id/books> [diakses pada tanggal 30 Oktober 2015].
- Nugroho, Nurhasan (2015). *Konsep kesuksesan sistem informasi DeLone And McLean*, diakses pada tanggal 10 Januari 2016 dari [https://www.academia.edu/8107438/Konsep\\_kesuksesan\\_sistem\\_informasi\\_DeLone\\_And\\_McLean](https://www.academia.edu/8107438/Konsep_kesuksesan_sistem_informasi_DeLone_And_McLean).
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Republik Indonesia Nomor Per - 24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak.
- Prahaji, Maulana (2015). *Analisis Penerapan Elektronik Nomor Faktur Sebagai Upaya Mencegah Penerbitan Faktur Pajak Fiktif (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga)*. Skripsi; Malang, Program Sarjana UB.
- Sudiro, Achmad, Perdana Rahadian, dan Nur Prima. 2011. *Sistem Informasi Manajemen*. Malang: UB Press.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Republik Indonesia Nomor Se - 132/PJ/2010 Tentang Langkah-Langkah Penanganan Atas Penerbitan Dan Penggunaan Faktur Pajak Tidak Sah.
- Suyanto, M. *Pengantar Teknologi Informasi untuk Bisnis*. Yogyakarta: Andi.
- Syahroni, Ahmad (2013). *Pengertian Pengolahan Data Elektronik*, diakses pada tanggal 17 Oktober 2015 dari <http://ahmadsyahroni-jepara.blogspot.co.id/2013/01/pengertian-pengolahan-data-elektronik.html>.
- Widodo, Ari dan Putu Agung Widyadnyana. *E-Faktur, Satu Aplikasi Berbagai Manfaat*, diakses pada tanggal 24 November 2015 dari <http://www.ortax.org/ortax/?mod=issue&page=show&id=68>.
- Yamin, Luiyanto dan Titi Muswanti Putranti. 2009. *Model Penyelewengan Pajak Menggunakan Faktur Pajak Fiktif*

